



Suasana rapat paripurna DPRD Jatim yang berlangsung, Kamis (2/5/2024)

DPRD Apresiasi Capaian Opini WTP 9 Kali Beruntun dari BPK

SURABAYA, SURYA - Provinsi Jawa Timur kembali merah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan hasil pemeriksaan keuangan pemerintah daerah tahun 2023. Capaian ini mendapat apresiasi dari DPRD Jatim. Sebab, WTP ini menjadi kali kesembilan secara beruntun terhitung sejak tahun 2015.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PENYERAHAN LHP BPK ini diserahkan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Kamis (2/5/2024). Penyerahan dilakukan oleh Anggota V BPK RI Ahmadi Noor Supit kepada Ketua DPRD Jatim Kusnadi dan Pj Gubernur Jatim Adhy

Karyono. Rapat paripurna ini dipimpin oleh Kusnadi. "BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan penekanan suatu hal atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Jawa Timur tahun 2023," kata Ahmadi Noor Supit dihadapan para an-

ggota dewan dan jajaran Pemprov Jatim yang hadir dalam rapat paripurna. Pemeriksaan BPK atas LKPD dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan berdasar-

kan empat hal. Yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern.

Lalu, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kecukupan pengungkapan. Menurut Ahmadi, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pemeriksaan keuangan tidak secara khusus dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya kecurangan atau fraud dalam pengelolaan keuangan. Meski merah opini WTP, BPK mengungkapkan masih menemukan kelemahan pengendalian intern. Serta permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan regulasi.

Hanya saja ditegaskan, hal itu tidak mempengaruhi secara material kewajaran penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023.



Pemerintah Provinsi Jawa Timur ditegaskan wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK maksimal 60 hari setelah LHP diterima. BPK mendorong Pemprov Jatim untuk meningkatkan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya.

Ahmadi mengungkapkan harapan agar DPRD secara bersama-sama dengan Pemprov Jatim terus berupaya memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jawa Timur tahun 2023.

"Atas nama masyarakat Jawa Timur kami menyampaikan apresiasi dan peng-

rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP BPK sesuai dengan kewenangannya.

Capaian opini WTP pada tahun ini mendapat sambutan positif dari DPRD sebagai lembaga legislatif. Dalam sambutannya, Kusnadi mengatakan LHP BPK ini merupakan dasar dalam melakukan fungsi pengawasan anggaran oleh DPRD serta menjadi acuan dalam pembahasan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Jawa Timur tahun 2023.

"Kami akan menindaklanjuti dan memperbaiki kekurangan ke-

depan." kata Adhy Karyono. hargaan setinggi-tingginya kepada BPK karena telah melakukan tugas sesuai peraturan perundang-undangan. Kinerja yang baik ini patut diperhatikan semua lembaga, instansi di lingkungan Pemprov Jatim. Sehingga masyarakat Jawa Timur mampu semakin menaruh harapan besar," kata Kusnadi.

Sementara itu, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono mengungkapkan terimakasih atas opini WTP yang diberikan oleh BPK yang terhitung sebanyak 9 kali berturut-turut. "Kami akan menindaklanjuti dan memperbaiki kekurangan ke-



Suasana rapat paripurna DPRD Jatim yang berlangsung, Kamis (2/5/2024)